

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu menjelaskan beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, tetapi memiliki persamaan tema. Pada tahun 2014 Toyyib menyelesaikan skripsi tentang pemberdayaan masyarakat tentang pemberdayaan perempuan dengan *home industry* kain jemputan di desa Cileban, Kelurahan tahunan di Jogjakarta<sup>3</sup>. Program pemberdayaan ini dilakukan secara kolektif, yakni pemerintah dan kelompok masyarakat dengan sebutan kelompok jemputan ibu sejahtera. Penelitian ini berfokus pada program pemberdayaan dan system sumber, dengan bantuan pemerintah setempat akhirnya program ini bisa berjalan secara baik dan hasil kain tersebut bisa bersaing di pasaran dengan kualitas SNI. Kedua, Rizki Melia Novika Sari, Jurusan Sosiologi FISIP UMM pada tahun 2015 tentang *Program Bank Sampah dalam Pemberdayaan Komunitas (Studi Nasabah M 20 Bank Sampah Malang di Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang)*<sup>4</sup>. Dari Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan dengan Program yang dilakukan Bank Sampah Malang memberikan dampak positif, yakni masyarakat bisa berinovasi untuk kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan sampah. Program tersebut telah memberikan manfaat pemberdayaan kepada

---

<sup>3</sup> Alamsyah, Toyyib. 2014. Skripsi “*pemberdayaan perempuan dengan home industry kain jemputan di desa cileban, Kelurahan tahunan Jogjakarta*”. Fakultas dakwah dan komunikasi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Jogjakarta.

<sup>4</sup>Sari, Rizki Melia Novika. 2015. *Program Bank Sampah dalam Pemberdayaan Komunitas (Studi Nasabah M 20 Bank Sampah Malang di Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang)*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

masyarakat yang menjadi bagian dari komunitas tersebut, serta memberikan manfaat dalam peningkatan kualitas lingkungan di sekitar mereka dalam pemberdayaan komunitas dikembangkan pada nasabah M20 di Kelurahan Polehan. Program tersebut dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah pada khususnya sampah rumah tangga. Berbagai program yang ada bukan hanya untuk mengatasipermasalahan sampah saja, tetapi juga memberikan pemberdayaan baik pembedayaan secara ekonomi, sosial, maupun budaya yang dilakukan dengan menggerakkan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan. Penelitian selanjutnya, Tri Yulianti dengan judul “Penguatan Institusi Lokal dan Menggerakkan Modal Sosial Melalui Komunitas untuk Menciptakan Kampung Berdaya” (Yulianti, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perkembangan Kampung 3G (Glantung Go Green) yang dulunya kumuh, memiliki banyak permasalahan serius di dalam kampungnya, dan juga memiliki tingkat ekonomi warganya rendah, sekarang mampu menjadi kampung yang berdaya secara sosial, ekonomi dan budaya. Hal tersebut terjadi karena usaha yang dilakukan oleh warganya atas dasar kepedulian terhadap lingkungan. Konsep Kampung 3G dianggap Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sangat inovatif dan layak jadi percontohan Nasional. Kemampuan ketua RW dalam mengkoordinir warga masyarakatnya untuk bisa bersama-sama wewujudkan kampung impian, dan juga untuk mengatasi maslaahmasalah yang ada di kampung tersebut. Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengkaji bagaimana seorang Ketua RW yang menjadi Agen dalam melayani warganya mampu memperkuat intitusi lokal dan menggerakkan modal sosial, serta upaya warga Kampung 3G

menciptakan kampung yang berdaya. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini adalah bagaimana usaha yang dilakukan oleh ketua RW di Kampung Glintung telah berhasil memberdayakan masyarakatnya untuk menciptakan kampung yang tertata rapi dan berhasil menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam kampung tersebut. Keberhasilan RW 23 Kelurahan Purwantoro Kabupaten Malang merupakan wujud dari keberhasilan pembangunan yang menuntut partisipasi warga dan komitmen pimpinan. Kemandirian adalah kunci utama yang di dapatkan dalam mewujudkan kampung tersebut, usaha keras dari ketua RW yang tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai seorang pemimpin yang hanya melayani keperluan administrasi kependudukan semata, akan tetapi juga harus menjadi manajer wilayah yang harus membangun bersama masyarakat. Tentunya setiap kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan oleh Kampung Glintung berdasarkan pada kesepakatan hasil rapat, dan tidak hanya diputuskan oleh ketua RW tetapi berdasarkan pada pendapat serta hasil dari musyawarah yang dilakukan.

Dari hasil penelitian diatas, peneliti ingin lebih memperdalam konsep strategi pemberdayaan masyarakat dengan program Glintung Go Green (3G) yang dilakukan oleh komunitas warga kelurahan Glintung RW 23 kecamatan Blimbing, kota Malang.

## **B. Pemberdayaan Masyarakat**

Istilah pemberdayaan (empowerment) berasal dari akar kata empower, yang mempunyai makna dasar “pemberdayaan” dimana “daya” bermakna kekuatan (power) atau kemampuan. Menurut Ambar Teguh (2004:77),

pemberdayaan dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya, kekuatan, kemampuan dan proses pemberian daya, kekuatan, kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Secara garis besar menurut Suparjan dan Hempri (2003:43), pengertian pemberdayaan masyarakat mengandung dua arti, yaitu: *to give ability or enable to*, yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program-program pembangunan, agar kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan dan *to give power or authority to*, yang berarti memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Ini berarti bahwa, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memampukan dan memandirikan masyarakat (*taking control over their lives, setting their own agendas skill, building self confidence, solving problems and developing self reliance*). Kemandirian merupakan proses kebangkitan kembali dan pengembangan kekuatan pada diri manusia yang mungkin sudah hilang karena ketergantungan, eksploitasi, dan subordinasi. Menurut Sumaryadi (2005:114), pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan harkat lapisan masyarakat dan pribadi manusia. Upaya ini meliputi; pertama, mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan potensinya dan menciptakan iklim atau suasana untuk berkembang. Kedua, memperkuat daya potensi yang dimiliki dengan langkah-langkah positif memperkembangkannya. Ketiga, penyediaan berbagai masukan dan pembukaan akses ke peluang-peluang.

Upaya yang dilakukan adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, akses kepada modal, teknologi tepat guna, informasi, lapangan kerja dan pasar, dengan fasilitas-fasilitasnya. Menurut Paul (dalam Suparjan dan Hempri 2003:43), bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Menurut Borrini (dalam Suparjan dan Hempri 2003:43), pemberdayaan merupakan konsep yang mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya alami dan pengelolaannya secara berkelanjutan. Pengertian tentang pemberdayaan juga diungkapkan dalam (<http://www.pemberdayaan.com>) yang mengutip beberapa pendapat ahli, diantaranya Bryant dan White menyatakan bahwa pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat miskin. Caranya yaitu menciptakan mekanisme dari dalam (build-in) untuk meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang adil, yaitu dengan menjadikan masyarakat mempunyai pengaruh. Sementara Sutrisno menyatakan empowerment bukan sekedar memberikan kesempatan masyarakat menggunakan sumber daya dan biaya pembangunan saja, tetapi juga upaya untuk mendorong mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur yang opresif. Konsep lain diungkapkan oleh Prijono dan Pranaka yang menyatakan bahwa pemberdayaan mempunyai dua makna, yaitu mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Makna lainnya adalah

melindungi, membela dan berpihak kepada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah. Pemberdayaan dimaknai sebagai segala usaha untuk membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan, karena kemiskinan yang terjadi tidak bersifat alamiah semata, melainkan hasil dari berbagai macam faktor yang menyangkut kekuasaan dan kebijakan, maka upaya pemberdayaan juga harus melibatkan kedua faktor. Pemberdayaan dimaknai sebagai proses pertumbuhan kekuasaan dan kemampuan dari masyarakat lemah atau bawah, terpinggirkan dan tertindas. Melalui proses pemberdayaan masyarakat bawah bisa terangkat dan muncul menjadi bagian masyarakat menengah ke atas. Berdasarkan hasil penelitian Murtadho yang berjudul usaha kelompok ternak selasa pon dalam 18 memberdayakan ekonomi anggotanya, bahwa masyarakat bisa berdaya dengan kegiatan usaha mandiri (KUM) dalam anggota kelompok ternak, sehingga ekonomi para pelaku ternak selasa pon meningkat kesejahteraannya.

Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberikan daya atau meningkatkan daya. Bisa diasumsikan tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak mempunyai daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari bahwa daya tersebut belum dapat diketahui. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini yang berkembang, maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan merupakan suatu upaya

untuk memberikan kemampuan sekaligus kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan. Buah dari pemberdayaan adalah penyadaran akan bakat atau kemampuan, kemandirian dan komitmen. Kesadaran akan kemampuan yang terpendam, keterampilan, kemandirian, dan komitmen merupakan human assets yang dapat dioptimalisasikan dalam proses pembangunan.

### **C. Tujuan Pemberdayaan**

Masyarakat Menurut Sumaryadi (2005:142), tujuan pemberdayaan masyarakat adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin, marjinal, dan kaum kecil, seperti petani kecil, buruh tani, masyarakat miskin perkotaan, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang dikesampingkan. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat secara sosial-ekonomi sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Menurut Sulistiyani (2004:80), tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah membentuk individu atau kelompok menjadi mandiri. Kemandirian meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya

kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Menurut Suharto (2005:60), tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri) maupun kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).

Menurut Hikmat (2006:135), tujuan pemberdayaan yaitu untuk menumbuhkembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial-budaya. Karena itu, kajian strategis pemberdayaan masyarakat baik masalah ekonomi, sosial, budaya maupun politik menjadi sangat penting sebagai masukan untuk reformulasi pembangunan yang berpusat pada rakyat. Melalui program pemberdayaan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk membangun diri secara partisipatif. Jadi kesimpulannya adalah tujuan dari pemberdayaan merupakan upaya penyadaran bahwa tujuan pemberdayaan adalah penyadaran akan bakat atau kemampuan, kemandirian dan komitmen. Kesadaran akan kemampuan yang terpendam, keterampilan, kemandirian, dan komitmen yang bias di kelola untuk dikembangkan semua itu merupakan human assets yang dapat dioptimalisasikan dalam proses pemberdayaan.

#### **D. Tahapan Pengembangan Masyarakat**

Dalam melaksanakan pemberdayaan tentu tidak terlepas dari bagaimana tahapan pengembangan agar program ataupun kegiatan bisa berjalan dengan fokus sesuai tujuan. Tahapan pengembangan masyarakat memiliki beberapa



versi. Secara sederhana Adi menjelaskan tahapan-tahapan tersebut dapat dicakupkan sebagai berikut:

1. Tahapan persiapan, mencakup pada tahapan persiapan petugas dan persiapan lapangan. Persiapan petugas yang dimaksud yaitu adanya tenaga petugas yang mampu mengkoordinir perencanaan pengembangan, dan persiapan lapangan yang dimaksud adalah sejauh mana lokasi lingkungan masyarakat berpotensi untuk dijadikannya tempat pengembangan masyarakat.
2. Tahapan assessment, yaitu melakukan pengidentifikasian masalah untuk menemukan fokus masalah sesuai kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat dan pelaku pemberdayaan dan sumber daya yang dimiliki.
3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, yaitu pelaku perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.
4. Tahap pemformulasian rencana aksi. Dalam tahap ini pelaku perubahan membantu kelompok masyarakat untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan guna mengatasi permasalahan yang ada.
5. Tahap implementasi program. Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahapan yang paling krusial dalam proses pengembangan masyarakat, karena suatu perencanaan dapat melenceng dalam pelaksanaan dilapangan bila tidak ada kerjasama antar pelaku perubahan dengan warga masyarakat.

6. Tahap evaluasi. Evaluasi sebagai pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Pengawasan diharapkan melibatkan warga yang menjadi subjek pemberdayaan agar dapat terbentuk suatu system komunitas dalam pengawasan secara internal.
7. Tahap terminasi, yaitu tahapan pemutusan atau perpisahan secara formal dengan komunitas sasaran. Pada tahapan ini pelaku perubahan tidak serta merta langsung melepas namun tetap melakukan kontak meskipun tidak secara rutin<sup>5</sup>. Kesimpulannya adalah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat harus memiliki metode yang sistematis agar tahapan yang dilakukan bisa memiliki hasil yang maksimal.

#### **E. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Hikmat, tujuan dari pemberdayaan menunjuk pada keadilan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perilaku sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan<sup>6</sup>. Pandangan diatas memiliki makna kesimpulan bahwa, Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah upaya yang dilakukan atas dasar kesadaran dari setiap individu untuk memaksimalkan keberfungsian sosial, hal ini dilakukan semata karena ingin sama – sama mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan sosial masyarakat.

---

<sup>5</sup>Rukminto, Isbandi. Opcit . Hlm 244-258

<sup>6</sup> Hikmat, Harry.2010. *Strategi pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press. Hal 14

## F. Partisipasi Masyarakat

Menurut Willie Wijaya, istilah partisipasi berasal dari bahasa Inggris ‘*participate*’ yang artinya mengikutsertakan, ikut mengambil bagian<sup>7</sup>. Partisipasi menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi<sup>8</sup>. Makna dari partisipasi adalah menempatkan diri pada suatu kegiatan yang melibatkan mental dan emosi serta fisik seseorang dalam memberikan respon terhadap kegiatan serta mendukung tercapainya tujuan. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat merupakan salahsatu proses terbentuknya modal sosial masyarakat yang memiliki tujuan dalam lingkup pemberdayaan. Partisipasi masyarakat juga bisa dibilang sebagai proses perubahan sosial yang sangat berpengaruh. Partisipasi yang tumbuh karena pengaruh atau karena tumbuh adanya rangsangan dari luar, merupakan gejala yang dapat diindikasikan sebagai proses sosial yang eksogen (*exogenous change*). Karakteristik dari proses partisipasi ini adalah semakin mantapnya jaringan sosial yang baru yang membentuk suatu jaringan sosial bagi terwujudnya suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan<sup>9</sup>.

Partisipasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang dapat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu<sup>10</sup> :

- (1) Adanya kesempatan masyarakat;
- (2) Adanya kemauan masyarakat;
- (3) Adanya kemampuan masyarakat.

---

<sup>7</sup> Bahaddur, Muslikh. 2012. *Partisipasi Orang Tua Siswa Dalam Pembelajaran Di Sd Islam Terpadu Salman Al Farisi Yogyakarta*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: UNY. Hlm 12

<sup>8</sup> Rukminto, Isbandi. Opcit . Hlm 27

<sup>9</sup> Mardikanto. Opcit. Hal 81

<sup>10</sup> Mardikanto. Ibid. hal 91

Adanya kesempatan yang diberikan menjadi faktor pendorong tumbuhnya kemauan, dan kemauan akan angat menentukan kemampuannya. Menurut Ife partisipasi merupakan suatu bagian penting dari pemberdayaan dan penumbuhan kesadaran, karena pengembangan masyarakat arus selalu berupaya untuk memaksimalkan partisipasi dengan tujuan membuat setiap orang terlibat aktif dalam proses-proses dan kegiatan masyarakat<sup>11</sup>. Dalam memandang sebuah partisipasi, Ife membagi partisipasi menjadi dua yaitu sebagai alat dan tujuan. Oakley et al. menyajikan perbandingan partisipasi sebagai berikut<sup>12</sup>:

**Tabel 3.1**  
**Partisipasi Sebagai Cara Dan Tujuan**

Partisipasi Sebagai Cara	Partisipasi Sebagai Tujuan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berimplikasi pada penggunaan partisipasi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya</li> <li>• Merupakan suatu Upaya pemanfaatan <u>sumber daya</u> yang ada untuk mencapaitujuan program atau proyek</li> <li>• Penekanan pada mencapai tujuan dan tidak terlalu pada aktivitas partisipasi itu sendiri</li> <li>• Lebih umum dalam program-program pemerintah, yang pertimbangan utamanya adalah untuk menggerakkan masyarakat dan melibatkan mereka dalam meningkatkan efisiensi system penyampaian</li> <li>• Partisipasi umumnya jangka pendek</li> <li>• Partisipasi sebagai cara merupakan bentuk pasif dari partisipasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berupaya memberdayakan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan mereka sendiri secara lebih berarti</li> <li>• Berupaya untuk menjamin peningkatan peran rakyat dalam inisiatif-inisiatif pembangunan</li> <li>• Fokus pada peningkatan kemampuan rakyat untuk berpartisipasi bukan sekedar mencapai tujuan-tujuan proyek yang sudah ditetapkan sebelumnya</li> <li>• Pandangan ini relatif kurang disukai oleh badan-badan pemerintah. Pada prinsipnya LSM setuju dengan pandangan ini</li> <li>• Partisipasi dipandang sebagai suatu proses jangka panjang</li> <li>• Partisipasi sebagai tujuan relative lebih aktif dan dinamis.</li> </ul>

Sumber: Ife, Jim Dan Frank Tesoriero. 2014. *Community Development (Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal: 296

<sup>11</sup> Ife, Jim Dan Frank Tesoriero. 2014. *Community Development (Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal: 285

<sup>12</sup>Ibid. Hal 296

Adapun beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pemberdayaan menurut Hamijoyo diantaranya yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif<sup>13</sup>:

- a. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
- b. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.
- c. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan program.
- d. Partisipasi keterampilan adalah partisipasi yang memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkan. Dengan maksud agar orang tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
- e. Partisipasi buah pikiran yaitu lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembagkan kegiatan yang diikutinya.

---

<sup>13</sup> Usmaniya, Desi. 2014. *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Program Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama(KUBE) di Kelurahan Dompok Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang*. Skripsi tidak diterbitkan. Tanjungpinang : FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji. Hlm 23

- f. Partisipasi sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban, yaitu menghadiri kegiatan-kegiatan yang diadakan. Dan dapat juga berupa sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.
- g. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, yaitu masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama.
- h. Partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandate kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Dengan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan partisipasi masyarakat bisa dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, partisipasi langsung masyarakat bisa membantu secara nyata dengan memberikan sedikit harta maupun benda –benda yang bermanfaat sedangkan secara tidak langsung masyarakat sendiri bisa memberikan ide dan gagasannya.

#### **G. *Glantung go green (3G)***

3G adalah sebuah gerakan sosial bernama Glantung Go Green (3G). Ini bukan gerakan mudah, mengingat gagasan dasarnya ingin mempertahankan nilai-nilai luhur budaya kampung dan memperbaiki kondisi lingkungan dalam arti luas, sekaligus tetap menyerap nilai-nilai modern untuk memperkaya aspek sosial-ekonomi masyarakat.

Gerakan 3G dimulai dengan kegiatan sederhana, yaitu penghijauan lingkungan yang diluncurkan pada bulan Pebruari 2012. Gerakan ini sekaligus

mendukung program Pemerintah Kota Malang dalam melakukan gerakan penghijauan Malang Ijo Royo-royo.

Dalam pelaksanaannya disepakati, setiap rumah wajib memiliki tanaman hijau sebagai syarat untuk memperoleh layanan administrasi kependudukan. Bagi mereka yang tidak mampu membeli tanaman, maka pihak RW menyediakan tanaman dan yang bersangkutan berkewajiban merawatnya.

Waktu terus bergulir dan wacana pengembangan kegiatan seputar 3G itu pun menjadi bahan diskusi masyarakat sehari-hari maupun dalam rapat-rapat tingkat RW. Hasilnya, saat ini tanaman yang dikembangkan bukan hanya asal hijau, dan indah, tetapi merambah ke tanaman yang dapat dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari.

Secara swadaya, masyarakat mulai belajar bercocok tanam tanaman sayuran dan tanaman pangan. Di bawah bimbingan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur, teknologi yang diterapkan pun bervariasi, mulai dari cara konvensional di lahan dan di pot/polibag, sampai dengan sistem hidroponik. Hal tersebut dikenalkan, sekaligus agar masyarakat bisa memilih teknologi yang paling sesuai dengan kondisinya masing-masing.

Kinerja masyarakat Glintung dalam implementasi 3G rupanya menarik perhatian Pemda Kota Malang. Dikatakan demikian karena tumbuh-kembangnya 3G murni inisiatif masyarakat dan swadaya pula. Sejak tahun 2013 Glintung diikuti dalam Lomba Kampung Bersinar, gerakan Kampung Hijau Decofresh, sehingga pada tahun 2014 terpilih sebagai peserta lima besar kampung peraih nilai tertinggi dalam penilaian kebersihan di Kota Malang. Tanpa diduga pula, 3G juga menarik perhatian Menkominfo dan pegiat lingkungan dari Sumatera Utara.

Dari kampung yang tadinya kumuh disertai persoalan-persoalan sosial-ekonomi seperti telah dijelaskan di atas, kini menjadi asri, nyaman dan tentram. Bukan berarti Glintung telah berubah menjadi surga, karena masih ada beberapa persoalan, keinginan dan rencana masyarakat yang belum dapat dicapai sepenuhnya. <http://www.glintunggogreen.com/profil.html> (Diakses 10 januari 2019).

